

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Widia Putri (2023), dengan judul **"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Daerah Aliran Sungai Kecamatan Haur Gading (Studi Kasus Desa Palimbangan dan Desa Palimbangan Gusti)"**. Permasalahan yang ada di Desa Palimbangan yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat disebabkan karena minimnya sosialisasi, minimnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah. Sedangkan pada masyarakat Desa Palimbangan Gusti kurangnya kesadaran pengetahuan masyarakat disebabkan karena minim sosialisasi, faktor sumber daya manusia dan sarana prasarana, sehingga mengakibatkan air sungai keruh dan tercemar. Metode penelitian ini deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Daerah Aliran Sungai Kecamatan Haur Gading (Studi Kasus Desa Palimbangan dan Desa Palimbangan Gusti) secara umum belum optimal, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang belum berjalan dengan baik di Desa palimbangan dan Desa Palimbangan Gusti yaitu tujuan kebijakan, ukuran keberhasilan, sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, dan organisasi formal. Sedangkan indikator yang sudah berjalan

dengan baik yaitu organisasi informal, respon implementor, sikap menerima/menolak, koordinasi antar organisasi, kerjasama antar organisasi, kondisi masyarakat dan dukungan pemerintah. Faktor pendorong implementasi yaitu adanya komitmen dari pelaksana dan faktor penghambat keberhasilan implementasi adalah, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, minimnya sosialisasi dan kurangnya fasilitas pengelolaan sampah

2. Penelitian yang dilakukan oleh Supihadi (2022) dengan judul **"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan"**. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana kebijakan daerah tersebut dilaksanakan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya di lapangan. Latar belakang penelitian ini menyoroti masalah urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di Kecamatan Paringin yang memicu peningkatan volume sampah secara drastis, di mana pada tahun 2021 tercatat produksi sampah mencapai 42 ton per hari, namun hanya sekitar separuhnya yang mampu terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dalam studi ini menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier yang mencakup tiga variabel utama, yakni karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan variabel lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Paringin masih menghadapi berbagai kendala serius. Permasalahan utama yang teridentifikasi meliputi keterbatasan armada pengangkut sampah yang menyebabkan keterlambatan waktu angkut, serta lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah, khususnya peran Satpol PP dalam menegakkan sanksi tegas terhadap pelanggar aturan kebersihan. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat yang masih cenderung membuang sampah ke sungai atau membakarnya di sekitar pemukiman menjadi faktor penghambat yang signifikan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Implementasi

Menurut Reno Affrian (2023:27) Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan proses yang begitu kompleks, bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi berbagai kelompok kepentingan.

Menurut Kendi (2024:1) implementasi adalah memahami apa yang senyata-nya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus perhatian implementasi kebijakan menyangkut kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencaku, baik usaha-usaha untuk mengadminstrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Jones dalam Engkus (2022:188) implementasi merupakan proses yang penting dalam proses kebijakan, dan tak terpisahkan dari proses formulasi kebijakan.

Alasan implementasi menjadi sangat penting adalah:

- a. Tanpa implementasi kebijakan tak akan bisa mewujudkan hasilnya.
- b. Implementasi bukanlah proses yang sederhana, tetapi sangat kompleks dan rumit.
- c. Benturan kepentingan antar aktor baik administrator, petugas lapangan, maupun sasaran sering terjadi.
- d. Selama implementasi sering terjadi berbagai *interpretasi* atas tujuan, target maupun strateginya.
- e. Implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel
- f. Banyak kegagalan dalam implementasi kebijakan telah memunculkan kajian baru dalam studi kebijakan yaitu studi implementasi kebijakan.
- g. Guna menilai keberhasilan atau kinerja sebuah kebijakan maka dilakukan evaluasi kebijakan.

Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Purwanto & Sulistyastuti (2015:21).

2. Kebijakan Publik

a. Pengertian

Menurut Stone dalam Degdo suprayitno, dkk (2024:11) Kebijakan publik pada dasarnya merupakan pemikiria rasional untuk mencapai suatu tujuan yang ideal seperti keadilan, efisien, keamanan, kebebasan, dan berbagai tujuan lainnya dari masyarakat itu sendiri.

Menurut Anderson dalam Isnaini Rodiyah, dkk (2022:3) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah, Anderson mengimplikasikan kebijakan publik sebagai berikut :

- 1) Setiap pendekatan harus memiliki poin atau tujuan tertentu yang ingin dicapai.
- 2) Strategi terdiri dari serangkaian langkah atau contoh kegiatan yang diprakarsai oleh otoritas pemerintah.
- 3) Pengaturan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh otoritas publik dan bukan apa yang diyakini atau perlu dilakukan oleh otoritas publik.
- 4) Strategi bisa positif atau negatif.
- 5) Pendekatan publik dalam struktur positifnya bergantung pada regulasi dan bersifat definitif.

b. Jenis Jenis Kebijakan Publik

James Anderson dalam Siti Marwiyah (2022:13-14) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut :

- 1) Kebijakan *substantif* versus kebijakan *prosedural*
Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan *prosedural* adalah bagaimana kebijakan tersebut dapat dijalankan.
- 2) Kebijakan *distributif* versus kebijakan *regulatori* versus kebijakan *redistributif*
Kebijakan *distributif* menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan *regulatori* merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan *redistributif* merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.
- 3) Kebijakan material versus kebijakan simbolik
Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
- 4) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*)
Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan privat

goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

c. Tahap-Tahapan Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William N. Dunn dalam Siti Marwiyah (2022:14-16) adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas dalam mengatur kebijakan publik. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan publik.

2) Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, setelah itu masalah didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah.

3) Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Hal ini memberikan otorisasi pada proses pemerintahan. Jika tindakan *legitimasi* dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sudah direncanakan harus didukung.

4) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

5) Evaluasi Kebijakan/Penilaian

Evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

3. Implementasi kebijakan

a. Pengertian Implementasi kebijakan

Menurut Leo Agustino (2019:126) implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke

dalam bentuk tindakan, dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena ujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Menurut Arafat (2023:47) implementasi kebijakan adalah tahap dalam siklus kebijakan dimana keputusan kebijakan yang telah diambil diterjemahkan menjadi tindakan konkret dalam rangka mencapai tujuan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan melibatkan pelaksanaan program-program, kegiatan-kegiatan dan langkah-langkah operasional yang dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan.

b. Model-Model Implementasi Kebijakan

1) Model Warwic

Menurut Warwic dalam Reno Affrian (2023:48-50) ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan, yaitu :

a) Kemampuan organisasi

Implementasi kebijakan pada tahap ini dapat dimaknai sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya, seperti yang telah dibebankan atau ditetapkan pada suatu organisasi. Kemampuan organisasi terdiri dari unsur pokok: (i) kemampuan teknis, (ii) kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama, yang bermakna koordinasi antarinstansi yang terkait, dan (iii) meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan "SOPs" (*Standard Operating Procedures*), yaitu pedoman alur kerja dalam pelaksanaan kebijakan.

b) Informasi

Kurangnya informasi yang disampaikan oleh para aktor terhadap objek kebijakan atau kurangnya komunikasi antara organisasi pelaksana dengan objek kebijakan.

c) Dukungan

Kurang dukungan dari objek-objek kebijakan untuk "terikat" pada suatu kegiatan atau untuk memenuhi suatu kewajiban tertentu tingkat kepatuhan mereka menurun jika isi kebijakan bertentangan dengan opini atau keputusan mereka.

d) Pembagian Potensi

Kurangnya penyesuaian antara pembagian wewenang dan tanggung jawab dengan pembagian tugas termasuk

pembatasan-pembatasan yang tidak terlalu jelas dan adanya *desentralisasi* pelaksanaan.

2) Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Van Metter dan Van Horn dalam Reno Affrian (2023:29-32) merumuskan enam variabel yang memengaruhi kinerja kebijakan publik:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Pengukuran kinerja implementasi kebijakan bisa dilakukan menggunakan tingkat keberhasilan dengan syarat bahwa ukuran dan tujuan dari kebijakan tersebut memang realistis dengan kondisi sosial dan budaya yang ada di tingkat pelaksanaan kebijakan. Apabila ukuran atau tujuan kebijakan tidak realistis untuk diterapkan di tingkat warga, pelaksanaan kebijakan akan sulit mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan.

2. Sumber Daya

Keahlian untuk menggunakan sumber daya yang ada juga memainkan peran yang penting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi kebijakan. Dalam hal ini, manusia adalah sumber daya yang paling penting untuk menentukan keberhasilan implementasinya. Beberapa tahapan dalam proses implementasi menekankan tersedianya SDM yang kualitasnya sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan suatu kebijakan dan sudah ditetapkan secara politik. Dengan demikian, kenihilan kompetensi dan kapabilitas sumber daya bisa berdampak pada kinerja kebijakan publik.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Perhatian utama difokuskan pada agen pelaksana, baik terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini memiliki signifikansi penting karena kinerja implementasi kebijakan dalam bentuk organisasi formal maupun informal, yang akan publik sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang sesuai dan cocok dengan para agen pelaksana tersebut. Sebagai contoh, jika implementasi kebijakan publik bertujuan mengubah perilaku atau tingkah laku manusia secara radikal, agen pelaksana yang ditugaskan harus memiliki karakter yang tegas dan taat pada aturan serta sanksi hukum.

4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap menerima atau menolak dari pelaksana memiliki pengaruh yang sangat banyak akan keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi, sebab kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan

permasalahan yang mereka rasakan. Namun, kebijakan yang akan diimplementasikan adalah kebijakan "dari atas" (*top down*) yang mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui atau bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang masyarakat ingin selesaikan.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi proses implementasi, maka asumsi kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi dalang dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus juga memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

3) Model George Edward III

Berdasarkan Pandangan Edwards III dalam Reno Affrian (2023:38-

40) keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor penting yaitu:

1) Komunikasi kebijakan

Faktor ini merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*), komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi penyampaian informasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). Dimensi *transmission* yaitu menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan. Sementara itu, dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana agar sasaran kebijakannya dapat diterima dengan jelas sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuan dari kebijakan. Terakhir, dimensi konsistensi (*consistency*) yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.

2) Sumber daya

Meski ketentuan atau aturan jelas dan konsisten tetapi para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab kurang memiliki sumber daya, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Dimensi sumber daya terdiri dari tiga, yaitu manusia (*staff*), peralatan (*facilities*), serta informasi dan kewenangan (*information and authority*).

Dimensi sumber daya manusia adalah efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Sementara itu, dimensi sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan. Selanjutnya, dimensi informasi dan kewenangan adalah informasi yang relevan dan cukup tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Disposisi

Disposisi merupakan karakteristik yang menempel erat kepada pelaksana. Disposisi terdiri dari pengangkatan birokrasi (*staffing the bureaucracy*) dan insentif (*incentives*). Dimensi pengangkatan birokrasi merupakan pengangkatan dan pemilihan pegawai pelaksana kebijakan. Orang-orang yang dipilih harus memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Dimensi insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan pemberian penghargaan, baik uang maupun bentuk apresiasi lainnya.

4) Struktur birokrasi

Keempat yaitu struktur birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek penting dari setiap organisasi adalah adanya standard operating procedures (SOP). SOP akan menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Tidak jelasnya SOP di antara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya akan berdampak pada gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan. Dimensi fragmentation merupakan organisasi pelaksana yang terpecah-pecah atau tersebar akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana, koordinasi yang dibutuhkan semakin intensif.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono dalam Siti Marwiyah (2022:43-44)

implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

a. Isi Kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana dan penerapan prioritas, atau program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan kaitannya dengan sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Sebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana.

5. Pengelolaan Sampah

a. Pengertian dan Jenis Sampah

Sampah adalah semua benda atau material yang dibuang karena dianggap sudah tidak terpakai lagi, baik oleh manusia, hewan, tumbuhan, maupun proses industri. Sampah dapat berupa zat padat, cair, maupun gas yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari, seperti rumah tangga, industri, pertanian, pertambangan, maupun fasilitas kesehatan. Dalam konteks lingkungan, sampah sering dikaitkan dengan “bahan buangan” yang berpotensi menimbulkan pencemaran jika tidak dikelola dengan baik

Secara umum, sampah dibedakan menjadi tiga jenis utama:

1) Sampah organik

Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup (tumbuhan, hewan, atau manusia) dan dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme, seperti bakteri dan jamur. Contohnya: sisa makanan, sayuran, buah-buahan, daun kering, ranting, kompos, dan kotoran ternak. Sampah organik juga sering disebut sampah “basah” karena mudah membusuk dan dapat diolah menjadi pupuk kompos.

2) Sampah anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan bukan makhluk hidup dan tidak mudah terurai secara alami, sehingga memerlukan waktu sangat lama atau proses khusus untuk diurai. Contohnya: plastik, kaleng, kaca, kertas kering, besi, aluminium, styrofoam, dan kemasan berbagai produk. Sampah anorganik sering disebut sampah “kering” dan potensial didaur ulang jika dikelola dengan benar.

3) Sampah berbahaya dan beracun (B3)

Sampah B3 adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya atau beracun, baik secara fisik maupun kimia, dan dapat membahayakan kesehatan manusia maupun lingkungan jika tidak ditangani sesuai prosedur. Contohnya: limbah medis (jarum suntik, kapas bekas darah), baterai bekas, cat, oli bekas, pestisida, dan limbah bahan kimia berbahaya dari industri.

Berdasarkan bentuknya sampah padat adalah sampah yang berwujud fisik padat, seperti plastik, kertas, kaleng, botol. Sampah cair adalah limbah yang berupa air atau cairan bekas kegiatan manusia atau industri, misalnya: air bekas cucian, minyak bekas, air limbah rumah tangga, dan limbah cair industri. Sampah gas adalah emisi atau gas buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia, seperti asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan gas buangan dari proses industri.

Berdasarkan sumber nya sampah rumah tangga sampah yang berasal dari kegiatan di rumah, seperti dapur, kamar mandi, dan aktivitas bersih-bersih. Sampah industri sampah yang berasal dari kegiatan industri, baik padat maupun cair, yang sering mengandung bahan kimia berbahaya. Sampah medis / kesehatan, Sampah dari rumah sakit, puskesmas, dan klinik yang sering termasuk kategori B3, seperti jarum suntik, kasa, dan bekas obat. Sampah pertanian dan peternakan sampah dari kegiatan pertanian, seperti daun, sisa tanaman, dan kotoran ternak yang umumnya bersifat organik

Pemerintah kabupaten Hulu Sungai Utara melalui peraturan daerah Nomor 16 tahun 2013 menetapkan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan dengan Pengurangan, Pemanfaatan kembali, serta Pembinaan Bank Sampah.menerapkan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), guna meningkatkan kualitas

lingkungan, kesehatan masyarakat, serta mendorong manfaat sampah sebagai sumber daya yang bernilai.

Pengelolaan sampah yaitu proses menangani sisa kegiatan manusia agar tidak menimbulkan masalah bagi lingkungan maupun kesehatan, kegiatan dimulai dari pemilahan antara bahan organik dan anorganik lalu dilanjutkan dengan pengumpulan serta pengangkutan ke tempat penanganan. Tujuan agar buangan tidak menumpuk sembarangan dan tidak mencemari tanah, air, maupun udara disekitar kehidupan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, limbah yang masih bisa dimanfaatkan biasanya diolah kembali melalui daur ulang atau digunakan ulang menjadi barang berguna. Sisa makanan dan daun dapat dijadikan kompos, sedangkan plastik, kertas serta logam bisa diproses menjadi produk baru, cara ini membantu mengurangi jumlah kotoran yang berakhir ditempat pembuangan akhir.

Pengelolaan sampah mengandalkan sistem *end of pipe solution* yang menitikberatkan pada pengolahan sampah, ketika sampah tersebut telah dihasilkan. Kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA). Yudianto, dkk (2019:9).

b. Konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)

3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) merupakan pengelolaan sampah yang menekankan upaya pengendalian sampah sejak dari sumbernya agar jumlah limbah yang dihasilkan tidak berlebihan dan tidak mencemari

lingkungan. Prinsip ini sangat penting diterapkan karena sampah rumah tangga, pasar, maupun aktivitas lainnya terus bertambah setiap hari. Tanpa pengelolaan yang baik, sampah dapat menimbulkan bau, merusak pemandangan, menyumbat saluran air, menyebabkan banjir, hingga memicu munculnya penyakit. Oleh karena itu, 3R hadir sebagai pendekatan sederhana namun efektif yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik individu, keluarga, maupun masyarakat luas.

1) *Reduce* (mengurangi)

Merupakan usaha membatasi penggunaan barang yang dapat menghasilkan sampah. *Reduce* bukan berarti tidak boleh menggunakan barang sama sekali, melainkan lebih pada memilih secara bijak. Contohnya membeli produk dengan kemasan minimal, membawa wadah makan sendiri, menggunakan tas kain saat berbelanja, serta menghindari barang sekali pakai seperti sedotan plastik atau styrofoam. Kebiasaan ini sangat berpengaruh karena semakin sedikit barang yang digunakan, semakin sedikit pula sampah yang dihasilkan. *Reduce* dianggap sebagai langkah paling utama dalam 3R karena pencegahan sejak awal jauh lebih efektif daripada menangani sampah setelah terbentuk.

2) *Reuse* (menggunakan kembali)

Memanfaatkan barang yang masih layak pakai tanpa harus melalui proses pengolahan. Banyak barang sebenarnya masih bisa digunakan walaupun fungsi awalnya sudah selesai. Misalnya botol kaca dapat dijadikan wadah bumbu, kaleng bekas bisa menjadi

tempat alat tulis, dan kantong plastik dapat dipakai kembali untuk belanja. Kebiasaan ini membantu mengurangi kebutuhan membeli barang baru sehingga menghemat biaya sekaligus menekan jumlah limbah. *Reuse* juga melatih kreativitas masyarakat karena barang bekas dapat diubah menjadi benda yang bermanfaat dan menarik.

3) *Recycle* (mendaur ulang)

Mengolah sampah menjadi produk baru melalui proses tertentu. Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering dapat diolah menjadi kompos untuk pupuk tanaman. Sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam bisa diproses kembali menjadi bahan baku produk lain. Daur ulang biasanya memerlukan pemilahan sampah terlebih dahulu agar prosesnya lebih mudah dan hasilnya berkualitas. Selain mengurangi volume sampah, kegiatan ini juga memiliki nilai ekonomi karena hasil daur ulang dapat dijual atau dimanfaatkan kembali.

Penerapan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga berpengaruh pada keberlanjutan sumber daya alam. Dengan mengurangi penggunaan barang baru, kebutuhan bahan baku dari alam dapat ditekan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan. Di tingkat masyarakat, penerapan konsep ini juga dapat meningkatkan kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga lingkungan, menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial, serta memperkuat kerja sama dalam kegiatan pengelolaan sampah. Jika dilakukan secara konsisten, 3R mampu menjadi solusi

sederhana namun efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

C. Kerangka Pemikiran

Menurut Andri Kurniawan (2021:67) Kerangka pemikiran menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan kepada pembaca mengapa mempunyai anggapan seperti hipotesis, kerangka berfikir disajikan dengan bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti serta keterkaitan antara variabel yang diteliti.

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menganalisis secara mendalam proses pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Tambalang Kecamatan Sungai Pandan dan Desa Banyu Hirang Kecamatan Amuntai Selatan), dalam kerangka pemikiran analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III ada empat yaitu, komunikasi, sumber daya, *disposisi* (sikap pelaksana), struktur birokrasi menjadi fondasi utama yang menjelaskan faktor-faktor penentu keberhasilan atau kegagalan suatu program kebijakan di tingkat lapangan, di mana keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada substansi kebijakan yang dirancang secara sempurna, melainkan pada interaksi empat variabel kunci.

Komunikasi kebijakan yang jelas dan konsisten sehingga petunjuk teknis mengenai pengurangan volume sampah, pemanfaatan ulang, dan daur ulang dapat dipahami secara tepat oleh pelaku pelaksana seperti dinas

lingkungan hidup, petugas kebersihan, dan masyarakat di tingkat lokal, sumber daya yang memadai mencakup anggaran operasional, sarana prasarana seperti tempat pengumpulan sampah terpilah dan fasilitas pengolahan daur ulang, serta tenaga ahli yang terlatih untuk mendukung eksekusi program secara berkelanjutan, disposisi pelaksana yang mencerminkan komitmen, motivasi intrinsik, dan sikap proaktif dari birokrasi lokal, serta struktur birokrasi yang mendukung melalui koordinasi lintas instansi, wewenang yang tepat, dan mekanisme pengawasan yang efektif guna mengatasi *fragmentasi* tanggung jawab antar-dinas terkait.

Pengelolaan sampah kebiasaan umum yang hanya mengandalkan pendekatan kumpul, angkut, buang, terbukti tidak efektif dan menyebabkan beban berlebihan pada tempat pemrosesan akhir (TPA), menuju pengelolaan sampah terpadu menitik beratkan pada prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sejak dari sumber dengan melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik di tingkat rumah tangga di ikuti dengan pengomposan dan daur ulang menjadikan jumlah sampah yang dibuang ke TPA dapat dikurangkan secara cukup besar.

Penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III karena dinilai paling sesuai untuk menganalisis dalam penelitian ini, memberikan gambaran untuk menentukan bagaimana suatu penerapan kebijakan kebijakan sehingga penulis menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

